

Vol. 13 No. 1 Januari 2026

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 779-791

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

## Evaluasi Penerimaan Retribusi Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Nadya Jennyharty Beta<sup>1</sup>, Yosefina Andia Dekrita<sup>2</sup>, Imelda Virgula Wisang<sup>3</sup>

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: [jennybetaa@gmail.com](mailto:jennybetaa@gmail.com)

### Abstract

*The tourism sector is a strategic domain with significant potential to augment Local Own-Source Revenue (PAD) through the collection of tourism levies. However, the realization of this potential is often impeded by various implementation challenges. This study aims to evaluate the effectiveness of tourism levy revenue in enhancing the PAD of Sikka Regency. Employing a descriptive qualitative methodology, data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews. The findings reveal that while the implementation of tourism levies is underpinned by a clear legal framework and orderly administrative mechanisms for collection, recording, and reporting, the revenue realization remains suboptimal. This is evidenced by the achievement of only 47% of the designated target. Kiosk fees at the Snack and Souvenir Center emerged as the primary revenue contributor, whereas other levies, such as parking and recreation venue fees, contributed nothing due to a critical lack of on-site management personnel. This condition indicates that deficiencies in management and supervision are the principal obstacles to optimizing tourism levy revenue. Therefore, concerted efforts are imperative, including restructuring the collection system, appointing dedicated field managers, and fostering collaboration with third parties. These measures are crucial to harness the full potential of tourism levies and substantially support the growth of Sikka Regency's Local Own-Source Revenue.*

*Keywords: Tourism Retribution; Local Revenue*

### Abstrak

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pariwisata. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan retribusi pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pariwisata telah didukung oleh dasar hukum yang jelas serta mekanisme pemungutan, pencatatan, dan pelaporan yang tertib secara administratif. Namun, realisasi penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka belum optimal, yang tercermin dari capaian realisasi sebesar 47% dari target yang telah ditetapkan. Retribusi kios di Pusat Jajanan dan Cenderamata menjadi jenis retribusi dengan kontribusi terbesar, sementara retribusi pariwisata seperti retribusi parkir serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga belum memberikan kontribusi penerimaan akibat belum tersedianya pengelola di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan pengelolaan dan pengawasan menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan retribusi pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penerimaan melalui penataan sistem pemungutan, penyediaan pengelola di

lapangan, serta kerja sama dengan pihak ketiga agar potensi retribusi pariwisata dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.

Kata kunci: retribusi pariwisata, pendapatan asli daerah

## **Pendahuluan**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan sektor pariwisata yang optimal dapat memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan penerimaan pemerintah daerah (Suastika & Mahendra Yasa, 2017) dalam (Aneldus *et al.*, 2020:1605). Oleh karena itu, pariwisata perlu dikelola secara efektif agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Siregar, 2015:31 dalam Ersita *et al.*, 2016:890). PAD menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Junior, 2018 dalam Ilham *et al.*, 2022:1451). Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi keharusan bagi pemerintah daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan untuk kepentingan individu atau badan usaha (Yani, 2002:55 dalam Kula *et al.*, 2023:80). Seperti halnya pajak, retribusi daerah memegang peranan penting dalam struktur penerimaan keuangan daerah dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD (Gomies & Pattiasina, 2011:178).

Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi pariwisata cukup beragam, meliputi wisata alam, budaya, dan bahari. Potensi tersebut menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka mengelola beberapa jenis retribusi, antara lain retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata meliputi retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi tempat khusus parkir, serta pemanfaatan fasilitas wisata seperti gazebo, tiket masuk, dan fasilitas umum di objek wisata Kajuwulu dan Pantai Wairterang.

Namun demikian, penerimaan retribusi pariwisata di Kabupaten Sikka belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang dimiliki. Data target dan realisasi penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka selama periode 2021-2024 menunjukkan adanya fluktuasi antara target dan realisasi penerimaan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024

| No | Tahun | Target      | Realisasi   | %       |
|----|-------|-------------|-------------|---------|
| 1  | 2021  | 73.750.000  | 63.344.000  | 85,89%  |
| 2  | 2022  | 150.000.000 | 82.827.500  | 55,21%  |
| 3  | 2023  | 150.000.000 | 85.841.000  | 57,23%  |
| 4  | 2024  | 116.735.500 | 143.333.000 | 122,78% |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka

Berdasarkan Tabel 1, realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2021 menunjukkan capaian yang relatif baik. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan persentase realisasi meskipun target penerimaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan target belum diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan potensi retribusi pariwisata. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan melampaui

target, namun peningkatan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari sektor pariwisata, melainkan dipengaruhi oleh retribusi jasa usaha non-pariwisata, khususnya pemanfaatan alat seperti *billboard* yang berkaitan dengan kegiatan politik daerah.

Fluktuasi penerimaan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan retribusi daerah masih belum stabil dan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penerimaan retribusi pariwisata, termasuk pelaksanaan, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pariwisata guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.

## **Tinjauan Teori**

### **Stewardship Theory**

Teori *stewardship* diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1989) yang menjelaskan bahwa seorang *steward* tidak semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Teori ini berlandaskan pendekatan psikologi dan sosiologi yang memandang bahwa individu pada dasarnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan bersama. Dalam perspektif *stewardship*, manajemen diasumsikan akan bertindak sebaik mungkin demi kepentingan publik dan *stakeholders* (Nugraha & Muid, 2024:170 dalam Masturoh, 2025:4).

Dalam konteks pengelolaan penerimaan daerah, khususnya pada sektor pariwisata, pemerintah daerah dapat diposisikan sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola potensi pariwisata secara optimal. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebagai pengelola retribusi pariwisata diharapkan mampu mengelola sumber daya pariwisata secara efektif dan transparan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi wisata demi kepentingan bersama.

Hubungan antara *steward* dan *principal* dalam teori *stewardship* dibangun atas dasar kepercayaan, komitmen kolektif, dan keselarasan tujuan organisasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk berupaya mencapai tujuan pembangunan daerah, salah satunya melalui peningkatan PAD.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri dan dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Anggraeni, 2010:15 dalam Mafaza *et al.*, 2016:2). PAD juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah (Sururama *et al.*, 2023:192).

Menurut Anggoro (2017:18) dalam (Muchlisin *et al.*, 2019:154), PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Tingginya PAD sering dijadikan indikator tingkat kemandirian dan kemajuan suatu daerah, karena dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh individu atau badan usaha (Gomies & Pattiasina, 2011:178). Retribusi daerah menjadi salah satu komponen penting dalam struktur PAD karena memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan daerah.

Usman (2017:92) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi

sangat diperlukan karena semakin besar penerimaan retribusi daerah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara penerimaan retribusi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **Retribusi Pariwisata**

Retribusi pariwisata merupakan salah satu bentuk retribusi daerah yang dikenakan kepada pengunjung destinasi wisata sebagai imbalan atas pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan pemerintah daerah. Ani (2020:2) menyatakan bahwa retribusi pariwisata termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha yang dipungut dari setiap pengunjung objek wisata.

Menurut Lolita *et al.*, (2018:132) dalam (Lera *et al.*, 2024:65), retribusi pariwisata dipahami sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang secara khusus disediakan untuk kepentingan individu maupun badan usaha. Retribusi pariwisata dapat bersumber dari berbagai jenis pungutan, seperti tiket masuk objek wisata, retribusi parkir, izin pemanfaatan lokasi usaha, serta penerimaan sah lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata (Saputra, 2018:98 dalam Lera *et al.*, 2024:65).

### **Metode**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata dan uraian naratif, bukan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2010). Data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi penerimaan retribusi pariwisata serta peranannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka.

Penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap suatu permasalahan dengan menggambarkan kondisi yang terjadi secara sistematis dan faktual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan penerimaan retribusi pariwisata, seperti data target dan realisasi penerimaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kondisi penerimaan retribusi pariwisata, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka, dan selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan Penerimaan Retribusi Pariwisata**

Pelaksanaan penerimaan retribusi pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam penetapan jenis retribusi, tarif, serta mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah. Keberadaan dasar hukum yang jelas memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi serta membatasi praktik pemungutan di luar ketentuan yang ditetapkan.

Jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka terdiri atas retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum meliputi retribusi kios di Pusat Jajanan dan Cenderamata (PJC), sedangkan retribusi jasa usaha mencakup penyewaan tanah dan bangunan di kawasan PJC, retribusi pemakaian alat (*billboard*) namun pada Juli 2025 telah dialihkan pengelolaannya ke bagian aset daerah, sehingga dinas tidak lagi mengelola penerimaan dari retribusi tersebut. Serta retribusi tempat khusus parkir dan tempat rekreasi dan olahraga pada objek wisata Kajuwulu dan Pantai Wairterang yang dikelola dinas.

Namun demikian, tidak seluruh jenis retribusi tersebut dapat berjalan secara optimal karena keterbatasan pengelola di lapangan.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka diposisikan sebagai *steward* yang dipercaya masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya publik secara bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap dasar hukum serta pengelompokan jenis retribusi menunjukkan adanya upaya dinas dalam menjalankan peran *stewardship* guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka November 2025

| No           | Jenis Retribusi                               | Target                   | Realisasi               | %          |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | Retribusi Kios                                | Rp 75.600.000,00         | Rp 38.432.000,00        | 51%        |
| 2            | Retribusi Penyewaan tanah dan Bangunan        | Rp 38.102.164,00         | Rp 21.868.000,00        | 57%        |
| 3            | Retribusi Pemakaian Alat ( <i>Billboard</i> ) | -                        | Rp 5.640.000,00         | -          |
| 4            | Retribusi Tempat Parkir                       | Rp 2.698.000,00          | 0                       | 0%         |
| 5            | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga        | Rp 24.724.000,00         | 0                       | 0%         |
| <b>Total</b> |                                               | <b>Rp 141.124.164,00</b> | <b>Rp 65.940.000,00</b> | <b>47%</b> |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa total target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp141.124.164, sedangkan realisasi penerimaan hanya mencapai Rp65.940.000 atau 47% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah, khususnya yang bersumber dari sektor pariwisata, belum optimal.

Retribusi kios dan retribusi penyewaan tanah dan bangunan merupakan jenis retribusi dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan retribusi daerah, dengan capaian masing-masing sebesar 51% dan 57%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis retribusi yang dikelola secara rutin dan memiliki mekanisme pemungutan yang jelas cenderung memberikan kontribusi yang lebih stabil.

Sebaliknya, retribusi pariwisata seperti retribusi tempat parkir serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak menunjukkan realisasi penerimaan meskipun telah ditetapkan target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi retribusi pariwisata di Kabupaten Sikka belum dimanfaatkan secara optimal, terutama pada jenis retribusi yang berkaitan langsung dengan aktivitas wisata.

### **Kendala dalam Pengelolaan Retribusi Pariwisata**

Kendala utama dalam pengelolaan penerimaan retribusi pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah belum tersedianya pengelola di lapangan, seperti retribusi tempat parkir serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Ketiadaan pengelola menyebabkan pemungutan retribusi dari aktivitas wisata belum dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran menjadi faktor yang memengaruhi belum tersedianya petugas pemungut maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan penerimaan bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen aparatur, melainkan oleh keterbatasan sumber daya yang menghambat optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai *steward* dalam mengelola potensi pariwisata.

### **Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Pariwisata**

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka merencanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan objek wisata, khususnya di kawasan Kajuwulu dan Wairterang. Strategi ini didukung oleh pendanaan dari Badan Anggaran DPRD melalui skema bagi hasil sebesar 20% atau pemberian honor tetap kepada pengelola sebesar Rp. 350.000.

Kerja sama dengan pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pariwisata serta mendorong pengelolaan objek wisata yang lebih teratur dan berkelanjutan. Selain strategi jangka pendek tersebut, dinas juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang melalui penataan sistem pengelolaan, optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kualitas objek wisata.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, strategi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjalankan peran *stewardship* secara berkelanjutan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan pengelolaan sumber daya publik guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pelaksanaan penerimaan retribusi pariwisata telah dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta didukung oleh mekanisme pemungutan, pencatatan, dan pelaporan yang tertib secara administratif. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pariwisata belum optimal, yang tercermin dari capaian realisasi yang masih berada di bawah target yang ditetapkan, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka belum maksimal.
2. kendala utama dalam pengelolaan penerimaan retribusi pariwisata terletak pada belum tersedianya pengelola di lapangan, khususnya pada retribusi tempat khusus parkir serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Keterbatasan anggaran untuk membiayai pengelola menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi secara efektif

dan berkelanjutan, sehingga potensi penerimaan retribusi pariwisata belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. upaya peningkatan penerimaan retribusi pariwisata yang dirumuskan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dilakukan melalui perencanaan kerja sama dengan pihak ketiga serta pengelolaan jangka panjang. Strategi tersebut mencakup penerapan skema bagi hasil, pemberian honorarium tetap, penataan sistem pengelolaan, serta peningkatan kualitas objek wisata. Upaya ini mencerminkan peran pemerintah daerah sebagai *steward* yang berkomitmen mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan bersama guna meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi pariwisata dan kontribusinya terhadap PAD secara berkelanjutan

### **Saran**

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka untuk mempercepat realisasi kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan objek wisata, khususnya pada retribusi parkir serta tempat rekreasi dan olahraga;
2. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka untuk melakukan penataan sistem pemungutan dan pengawasan di lapangan agar penerimaan retribusi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan;
3. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka untuk memperkuat perencanaan jangka panjang melalui peningkatan kualitas objek wisata guna mengoptimalkan potensi retribusi pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji strategi optimalisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan cakupan objek atau pendekatan metode yang lebih beragam guna memperkaya pengembangan kebijakan pendapatan daerah di sektor pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneldus, S. Y., & Dewi, M. H. U. (2020). Pengaruh sektor-sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(7), 1431–1630.
- Ani, M. (2020). Pengaruh retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Utara. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo*.
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Gomies, S. J., & Pattiasina, V. (2011). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmiah Aset*, 13(2), 175–183.
- Ilham, S., Syahrir, S. N., & Supardi, D. (2022). Analisis kontribusi, pertumbuhan, efisiensi, dan efektivitas retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1451–1461.
- Kula, M. A., Dekrita, Y. A., & Sanga, K. P. (2023). Analisis penerimaan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Lera, E. V. O., Tanusi, G., & Jamu, M. E. (2024). Analisis potensi retribusi pariwisata Pantai Mekko di Desa Pledo Kecamatan Witihamo. *Scientific Journal of Management and Business (SJMB)*, 4(2), 62–75.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
- Masturoh, K. (2025). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2023* (Disertasi doctoral, Universitas BPD).
- Muchlisin, M. R., Purnamaningsih, N., & Juwarni, D. (2019). Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014–2018. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 2(1), 151–168.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Sururama, R., Johannes, A. W., & Pratama, A. Y. (2023). Strategi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surakarta, Jawa Tengah. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(2), 191–203.

Usman, R. (2017). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 1(1), 87–103.